

MODEL IMPLENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN MANGROVE DALAM ASPEK KAMANAN WILAYAH PESISIR PANTAI KEPULAUAN BATAM DAN BINTAN

Faisyal Rani¹

¹Mahasiswa Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Riau

¹Dosen FISIPOL Universitas Riau

faisyalrani.unri@gmail.com

ABSTRAK

Wilayah pantai dan pesisir memiliki nilai strategis dari aspek ekologi, sosial-keamanan dan ekonomi. Wilayah pesisir merupakan wilayah pintu gerbang bagi berbagai aktifitas pembangunan manusia dan sekaligus menjadi pintu gerbang dari berbagai dampak dari aktifitas tersebut. wilayah pesisir merupakan wilayah yang pertama kali dan paling banyak menerima tekanan dibandingkan dengan wilayah lain. Tekanan tersebut muncul dari aktivitas pembangunan seperti pembangunan permukiman dan aktivitas perdagangan karena wilayah pesisir paling rentan terhadap perubahan baik secara alami ataupun fisik sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan, salah satunya adalah ekosistem mangrove. Kondisi hutan mangrove di Indonesia terus mengalami kerusakan dan pengurangan luas dengan kecepatan kerusakan mencapai 530.000 ha/tahun. Sementara laju penambahan luas areal rehabilitasi mangrove yang dapat terealisasi masih jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju kerusakannya, yaitu hanya sekitar 1.973 ha/tahun. Demikian juga kondisi hutan mangrove di Kepulauan Batam dan Bintan dalam keadaan rusak. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk memulihkan kembali hutan mangrove yang rusak agar dapat kembali memberikan fungsinya bagi kesejahteraan manusia dan mendukung pembangunan wilayah pesisir. Peran pemerintah dalam membuat regulasi dan implementasi sangat penting dalam mencapai upaya pengendalian kerusakan tersebut.

Kata kunci: wilayah pesisir, model implementasi, kebijakan pemerintah, mangrove

PENDAHULUAN

Salah satu bagian terpenting dari kondisi geografis Indonesia sebagai wilayah kepulauan adalah wilayah pantai dan pesisir dengan garis pantai sepanjang 18.000 km. wilayah pantai dan pesisir memiliki nilai strategis dari aspek ekologi, sosial-keamanan dan ekonomi.

Perubahan yang terjadi pada wilayah pesisir dan laut tidak hanya sekedar gejala alam semata, tetapi kondisi ini sangat besar dipengaruhi oleh aktifitas manusia yang ada di sekitarnya. Wilayah pesisir merupakan wilayah pintu gerbang bagi berbagai aktifitas pembangunan manusia dan sekaligus menjadi pintu gerbang dari berbagai dampak dari aktifitas tersebut. Dengan kata lain wilayah pesisir merupakan wilayah yang pertama kali dan paling banyak menerima tekanan dibandingkan dengan wilayah lain. Tekanan tersebut muncul dari aktivitas pembangunan seperti pembangunan permukiman dan aktivitas perdagangan karena wilayah pesisir paling rentan terhadap perubahan baik secara alami ataupun fisik sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan, salah satunya adalah ekosistem mangrove.

Ekosistem mangrove sering disebutkan sebagai hutan payau atau hutan bakau. Ekosistem mangrove merupakan tipe hutan daerah tropis yang khas tumbuh disepanjang pantai atau muara sungai yang masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

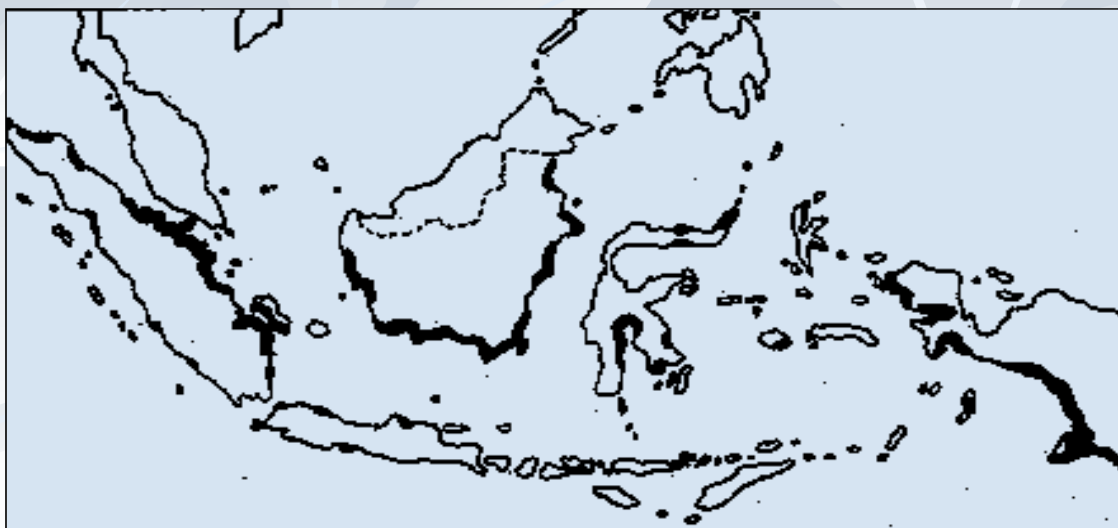
Potensi sumberdaya hutan mangrove di era otonomi saat ini merupakan aset daerah yang tidak kecil, artinya dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah khususnya pembangunan daerah pesisir. Karena itu, pelestarian hutan mangrove merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan, dengan tetap mempertahankan manfaat ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya lokal setempat. Menyadari pentingnya manfaat hutan mangrove bagi kehidupan masyarakat khususnya daerah pesisir, baik manfaat langsung maupun tidak langsung, maka sumberdaya hutan mangrove harus tetap dipertahankan keberadaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Mangrove di Kepulauan Batam dan Bintan

Luas ekosistem mangrove di Indonesia pada tahun 1982 tercatat seluas 5.209.543 ha. Luasan tersebut menyusut sampai 46,96 % atau tersisa 2.496.158 ha pada tahun 1993 (Dahuri dkk., 2001). Kecepatan kerusakan mangrove mencapai 530.000 ha / tahun, berarti berkurangnya luasan hutan bakau di Indonesia diperkirakan 1,1% per tahun.

Gambar Sebaran Mangrove di Indonesia



Berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi kepulauan Riau tahun 2002 luas total hutan mangrove 32.700 ha. Dari jumlah tersebut Pulau Bintan memiliki hutan mangrove seluas 16.998 ha atau 52% dari total luas hutan mangrove di Propinsi Kepulauan Riau.

Secara umum, kerusakan yang terjadi disebabkan oleh:

1. Konversi untuk pemukiman

Salah satu penyebab terbesar kerusakan ekosistem hutan bakau adalah konversi untuk pemukiman. Penduduk Indonesia yang tinggal di radius 100 km dari garis pantai mencapai 96% dari total populasi. Hal ini karena wilayah pesisir menyediakan ruang kemudahan bagi aktivitas ekonomi seperti pasar, transportasi (pelabuhan, kapal), aksesibilitas dan rekreasi. Wilayah pesisir memegang peranan penting dalam kelangsungan proses kegiatan ekonomi di Indonesia. Karena itu ekosistem hutan bakau merupakan salah satu area yang dikonservasi untuk pemukiman termasuk pelabuhan dan sebagainya. Konversi hutan bakau untuk pemukiman penduduk masih terus berlangsung di berbagai daerah di Indonesia.

2. Konversi untuk tambak

Meningkatnya harga udang windu di pasaran internasional membuka lahan pertambakan secara besar-besaran, dan areal yang dikonversi untuk pertambakan adalah hutan bakau. Kawasan hutan bakau dianggap paling cocok untuk lokasi pertambakan. Karena itu, potensi lahan untuk area tambak dihitung berdasarkan luas lahan mangrove yang ada. Dari berbagai studi, kemudian diusulkan agar pembukaan lahan hutan bakau untuk pertambakan tidak melebihi 30% dari hutan bakau yang tersedia. Tidak lain tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem kawasan pantai. Namun kenyataannya konversi ekosistem hutan bakau untuk tambak dilakukan dengan membabi buta dan hanya mempertimbangkan dari aspek ekonomi saja tanpa mempertimbangkan faktor ekologi. Karena itu, pembukaan lahan untuk tambak telah menyebabkan kerusakan hutan bakau yang sangat serius.

3. Pengambilan kayu

Tumbuhan bakau yang berupa pohon kayu antara lain adalah bakau, tanjang, api-api, pedada, nyirih, tengar dan buta-butu. Pohon-pohon di ekosistem hutan bakau menghasilkan kayu yang berkualitas baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk konstruksi bangunan dan kebutuhan rumah tangga (kayu bakar). Pengambilan kayu untuk bahan bangunan dan kayu bakar menyumbang kerusakan ekosistem hutan bakau, pengambilan kayu menyebabkan kegundulan, pada tahap selanjutnya terjadi abrasi pantai oleh gelombang pasang yang lama-kelamaan merusak garis pantai.

4. Pencemaran

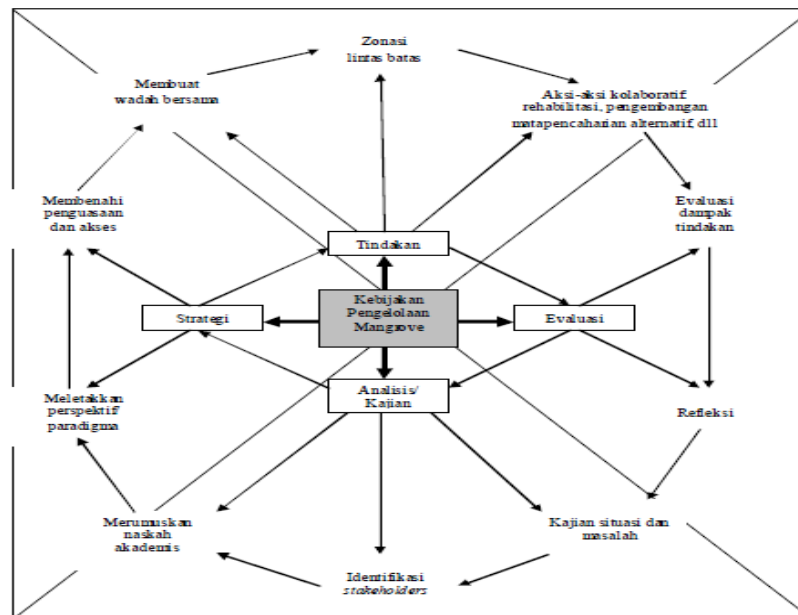
Pencemaran perairan, baik sungai, danau, perairan pesisir maupun laut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem hutan bakau. Bahan polutan yang masuk kedalam sungai dapat tersangkut ke pesisir sehingga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem hutan bakau. Pada umumnya bahan pencemar itu berasal dari kegiatan industri, pertanian, dan rumah tangga. Selain itu pencemaran juga dapat berasal dari aktivitas lalu lintas kapal yang terlalu tinggi melewati kawasan hutan bakau.

Laju degradasi dan deplesi sumberdaya kelautan beberapa tahun terakhir semakin tinggi, seperti berkurangnya luasan hutan mangrove serta rusaknya ekosistem beberapa daerah penangkapan ikan. Ironisnya, penduduk pesisir yang merasa memiliki wilayah ini semakin tidak berdaya untuk berkompetisi dengan pihak lain, sehingga mereka sering

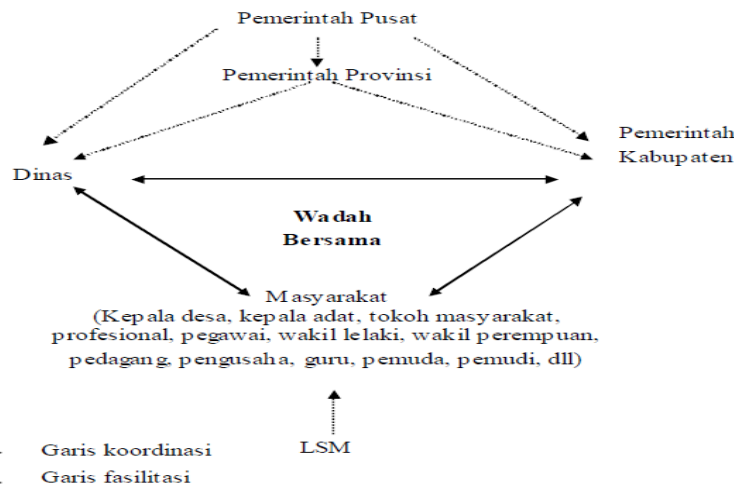
terpaksa melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya dengan mengabaikan kaidah kelestarian demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mengantisipasi konflik dan dampak negatif yang terjadi diperlukan suatu strategi kebijakan pengelolaan yang tepat dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan ekologis dengan tetap memperoleh manfaat ekonomisnya secara berkelanjutan.

Model Implementasi Kebijakan Mangrove

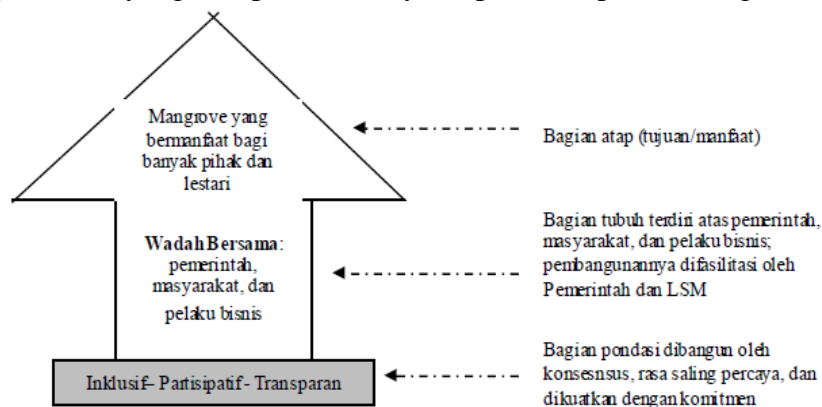
Model Perumusan Kebijakan Konservasi Hutan Mangrove



Model perumusan kebijakan di atas berawal dari tindakan yang dimulai dari menentukan zonasi lintas batas yakni lokasi hutan bakau yang akan dijadikan objek konservasi, kemudian tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah dengan memperbaiki kerusakan hutan bakau yang bukan hanya merehabilitasi, mengembangkan, namun juga dengan memperhatikan masyarakat yang bergantung kepada zonasi hutan bakau sebagai area mata pencaharian mereka kepada sumber alternatif yang mampu menjaga efektifitas konservasi hutan bakau. Jika mata pencaharian alternatif tidak disediakan, maka tindakan dalam kebijakan konservasi hutan bakau tidak akan efektif. Kemudian, setelah dilakukan upaya rehabilitasi dan mata pencaharian alternatif, langkah selanjutnya adalah dengan jalan mengevaluasi dampak tindakan tadi apakah sesuai dengan strategi kebijakan atau tidak, dan seterusnya hingga sampai pada tahap membuat wadah bersama yakni kebijakan yang telah dipetakan telah berada pada titik kesepakatan yang menghasilkan kerjasama antara masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pihak pemerintah dalam upaya komitmen menjaga keberlangsungan dan keberadaan konservasi hutan bakau. Tahapan model di atas bukanlah harga mati dan tidak selalu harus menunggu tahapan sebelumnya selesai. Beberapa tahap bisa berjalan bersamaan mengikuti situasi dan kondisi di lapangan. Proses koordinasi untuk membentuk wadah bersama juga bisa diilustrasikan dengan sebuah bagan di bawah ini:



Sebagaimana diuraikan di atas, wadah tersebut harus dibangun di atas pondasi (konsep dasar) yang kuat. Jika demikian adanya, maka pengelolaan kawasan hutan bakau yang dapat mendatangkan manfaat bagi bersama tidak mustahil akan tercapai. Proses ini ibarat sebuah rumah, dibangun mulai dari bawah (pondasi), lalu bagian tubuh yang mewadahi beragam kepentingan, dan terakhir atap yang dapat menaungi dan bermanfaat bagi mereka yang hidup di dalamnya, seperti nampak dalam gambar di bawah ini:



DAFTAR PUSTAKA

- Dahuri, R. 2000. *Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat (Kumpulan Pemikiran)*. Kerjasama LISPI dengan Ditjen P3K, DKP. Jakarta.
- Daniel M. Alongi, 2008, *Mangrove forests: Resilience, protection from tsunamis, and responses to global climate change*, *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 76 (2008) 1-13.
- International Union for Conservation of Nature and Natural Resources & Mangrove Action Project, 2007, *Kebijakan untuk Mangrove: Mengkaji Kasus dan Merumuskan Masalah*, IUCN Publications, UK.
- Sejati, Kuncoro, 2011, *Global Warming, Food, and Water: Problem, Solutions, and the Changes of World Geopolitical Constellation*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Titus Tri Wibowo, 1996, *Dampak Perubahan Iklim Terhadap Ekosistem Alami*, WACANA No. 3/Juli-Agustus 1996.